

Karakteristik Dari Proses Kependidikan Yang Bermakna Bagi Revitalisasi Pendidikan Moral Dalam Menghadapi Tantangan Zaman

Oleh: Tri Rijanto*)

Abstrak: Perbuatan korupsi yang dilakukan seseorang ataupun sekelompok orang menunjukkan rendahnya moral bahkan hilangnya moral individu dan moral bangsa. Ironisnya, korupsi itu terjadi di sekolah, sebagai pusat pembudayaan nilai-nilai moral anak bangsa. Rendahnya moral individu dan bangsa menunjukkan gagalnya pendidikan moral di sekolah. Bangsa yang korup dan moral masyarakatnya rendah akan sulit dalam menghadapi tantangan zaman, yaitu tantangan-tantangan yang lahir dari persoalan-persoalan yang dihadapi suatu masyarakat atau suatu bangsa dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, diperlukan proses kependidikan yang bermakna bagi revitalisasi pendidikan moral dalam menghadapi tantangan zaman.

Kata Kunci: proses kependidikan yang bermakna, pendidikan moral, tantangan zaman

1. Pendahuluan

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2003, Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), merupakan departemen terkorup setelah Departemen Agama (*Kompas*, 3 Mei 2005). Di samping itu korupsi dalam dunia pendidikan, menurut laporan *Indonesian Corruption Watch (ICW)*, dilakukan

bersama-sama dalam berbagai jenjang, dari tingkat sekolah, dinas, sampai departemen. Korupsi mulai dari soal pendirian dan rehabilitasi gedung, penerbitan buku pelajaran, sampai penyaluran beasiswa (dalam Darmaningtyas, 2005:5). Guru, kepala sekolah, kepala dinas, dan seterusnya masuk dalam jaringan korupsi. Sekolah yang diharapkan menjun-

*) Tri Rijanto adalah staf pengajar pada Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya (UNESA), sedang menyelesaikan program doktor.

jung nilai-nilai kejujuran justru mempertontonkan kepada siswanya praktik-praktik korupsi.

Banyak sekolah di Jakarta dan Jawa Barat tidak memasukkan komponen dana pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Sebuah SD favorit di Jakarta menerima *block grant* Rp 55 juta yang menjadi komponen tetap pembiayaan sekolah, tetapi tidak mencantumkannya dalam RAPBS. Anggaran SD favorit di Rawamangun, Jakarta Timur, mencapai Rp 2,7 miliar, hampir 50 persen dianggarkan untuk peningkatan kesejahteraan guru dan pegawai. Hanya sekitar 15 persen sampai 20 persen anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan akademis.

Di sebuah SMP Negeri di Jakarta Selatan, dana sekolah sebesar Rp 412 juta yang dipungut dari masyarakat, 75 persen di antaranya digunakan untuk kesejahteraan guru dan pegawai. Hanya 15 persen dialokasikan untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar. Anehnya, ada pula alokasi anggaran 1,5 persen untuk koordinasi dengan dinas pendidikan di kecamatan dan satu persen untuk dinas di tingkat kota. Bahkan, ada pos anggaran Rp 5.250.000,- untuk polisi. Jadi, dana yang masuk sekolah

dijadikan *bancakan*, dibagi-bagi (*Kompas*, 3 Mei 2005).

Data korupsi tersebut menunjukkan rendahnya moral, bahkan hilangnya moral individu dan moral bangsa. Ironisnya, korupsi itu terjadi di sekolah, sebagai pusat kebudayaan nilai-nilai moral anak bangsa. Rendahnya moral individu dan bangsa menurut hemat penulis menunjukkan gagalnya pendidikan moral di sekolah. Dengan demikian, diperlukan revitalisasi pendidikan moral di sekolah secara sungguh-sungguh.

Bangsa yang korup dan moral masyarakatnya rendah akan sulit dalam menghadapi tantangan zaman, yaitu tantangan-tantangan yang lahir dari persoalan-persoalan yang dihadapi suatu masyarakat atau suatu bangsa dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian, pertanyaannya adalah bagaimana karakteristik dari proses kependidikan yang bermakna bagi revitalisasi pendidikan moral dalam menghadapi tantangan zaman?

2. Kajian Teori dan Bahasan

2.1 Karakteristik Proses

Pendidikan yang Bermakna

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah untuk mengusahakan dan menyeleng-

garakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan *keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa*. Karakter manusia Indonesia dalam undang-undang tersebut adalah manusia Indonesia yang berakhlak mulia, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan cerdas dalam kehidupannya.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk *memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara* (UU No. 20 tahun 2003, Pasal 1, ayat 1). Karakter manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia Indonesia yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Untuk mencapai proses pendidikan yang bermakna bagi pengembangan manusia seutuhnya (berkarakter) dalam menunjang

revitalisasi pendidikan moral penulis berpendapat bahwa proses pendidikan harus berangkat dari empat pilar proses pembelajaran. Keempat pilar tersebut, yaitu (1) *learning to know*, (2) *learning to do*, (3) *learning to be*, dan (4) *learning to live together* (Delors, 1996:85-97). Pelaksanaan keempat pilar proses pembelajaran secara sungguh-sungguh pada setiap jenjang, jenis, dan jalur pendidikan merupakan karakteristik proses pendidikan yang bermakna bagi terwujudnya pendidikan moral.

Penerapan pilar pertama "*learning to know*" pada hakikatnya sejalan dengan penerapan paradigma ilmu pengetahuan pada proses pembelajaran di berbagai tingkat pendidikan sejak pendidikan dasar. Melalui penerapan paradigma ini peserta didik akan dapat memahami dan menghayati bagaimana suatu pengetahuan dapat diperoleh dari fenomena yang terdapat dalam lingkungannya. Melalui proses pendidikan semacam ini sejak sekolah dasar sampai perguruan tinggi diharapkan akan lahir generasi yang memiliki kepercayaan bahwa manusia sebagai kalifah Tuhan di bumi diberi kemampuan untuk mengelola dan mendayagunakan alam bagi kemajuan taraf hidup manusia. Penulis

sadar bahwa kalau semua pokok bahasan dipelajari melalui pendekatan ini, bahan yang dapat dipelajari akan sangat terbatas. Namun, penulis berpendapat bahwa suatu proses pembelajaran yang ditempuh dengan cara yang demikian akan lebih bermakna untuk dialihkan dalam mempelajari hal-hal lainnya (*transfer of learning*). Suatu proses pembelajaran yang tidak memiliki daya alih untuk perkembangan diri seorang peserta didik dapat dipandang sebagai pendidikan yang tidak bermakna.

Penerapan pilar kedua *learning to do* merupakan upaya agar peserta didik menghayati suatu proses belajar dengan melakukan sesuatu yang bermakna, suatu proses pembelajaran yang dikenal dengan *active learning*. Melalui pendekatan belajar semacam ini, seorang anak, misalnya, tidak selalu mencatat ceramah guru, melainkan peserta didik diminta untuk membaca sendiri bahan yang akan dibahas di kelas untuk selanjutnya membahasnya di kelas dengan guru dan kawan-kawannya. Bentuk lain yang termasuk belajar aktif dapat berupa penugasan untuk membuat ringkasan buku atau artikel yang ditugaskan untuk membacanya.

Di samping itu, banyak bentuk belajar aktif yang memungkinkan peserta didik berkesempatan aktif, baik secara intelektual, motorik, maupun emosional. Setiap mata-pelajaran dan bahan pelajaran pada dasarnya dapat dijadikan sebagai obyek belajar dengan pendekatan *active learning*. Model belajar aktif seyogyanya diterapkan pada semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Model belajar seperti ini akan memungkinkan tujuan mengembangkan manusia seutuhnya tercapai.

Pelaksanaan pilar ketiga *learning to be* merupakan suatu prinsip pendidikan yang dirancang bagi terjadinya proses pembelajaran yang memungkinkan lahirnya manusia terdidik yang mandiri. Rasa mandiri akan tumbuh dari suatu sikap percaya diri. Sikap percaya diri akan lahir dari pemahaman dan pengenalan dirinya secara tepat. Atas dasar itu proses pembelajaran pertama-tama harus memungkinkan peserta didik mengenal dirinya dengan penuh kebahagiaan.

Ini sukar diperoleh dalam proses pembelajaran tradisional yang menekankan hafalan. Kebahagiaan akan diperoleh melalui belajar aktif dan belajar tuntas. Pendekatan

melalui penerapan paradigma pengetahuan seperti menemukan dan pendekatan penyelidikan akan memungkinkan peserta menemukan kebahagiaan dalam belajar (*joy of learning*). Pendekatan belajar aktif yang pada hakikatnya sama dengan pendekatan pertama juga memungkinkan peserta didik menemukan kebahagiaan dalam belajar dan akhirnya dapat menemukan dirinya. Proses pembelajaran yang mendorong anak tidak tergantung kepada orang lain merupakan bentuk belajar yang menunjang terbentuknya pribadi yang mandiri.

Penerapan pilar *learning to live together* di dunia internasional dipandang bertambah penting karena dalam era globalisasi yang sarat muatan teknologi dan perdagangan bebas, diseminasi kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh setiap agama sering terlupakan karena tekanannya pada pertambahan nilai secara kebendaan. Oleh karena itu, proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik menghayati hubungan antar manusia secara intensif dan terus-menerus sangatlah penting. Pertentangan yang dasarnya perbedaan ras, agama, suku, keyakinan politik, dan kepentingan ekonomi yang masih sering terjadi perlu dihindarkan. Dengan kata lain,

pendidikan nilai kemanusiaan, moral, dan agama yang melandasi hubungan antar manusia atau pendidikan multikultur seperti Indonesia perlu diintensifkan di antaranya melalui pembelajaran kooperatif.

Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidaknya-tidaknya tiga tujuan pembelajaran penting, yaitu (1) hasil belajar akademik, (2) penerimaan terhadap keragaman, (3) pengembangan keterampilan sosial. Kerja kelompok kooperatif sebagaimana digambarkan oleh Dewey dan Thelan berjalan melampaui hasil belajar akademik. Tingkah laku kooperatif dipandang sebagai dasar demokrasi dan sekolah dipandang sebagai laboratorium untuk mengembangkan tingkah laku demokrasi. Senada dengan Dewey dan Thelan, Allport menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif lebih banyak meningkatkan hasil belajar daripada pembelajaran individual atau kompetitif (dalam Muslimin, dkk, 2000).

Penerapan pendekatan pembelajaran kooperatif menunjukkan bahwa siswa lebih mudah menemukan dan memahami konsep-konsep yang sulit jika mereka saling mendiskusikan masalah tersebut dengan temannya. Siswa secara rutin bekerja dalam kelompok (empat orang

dalam satu kelompok) untuk saling membantu memecahkan masalah-masalah yang kompleks. Penekanan pada hakekat sosial dalam belajar dan penggunaan kelompok sejawat untuk memudahkan cara berfikir yang sesuai, saling mengemukakan, dan saling meluruskan kekeliruan pengertian atau miskonsepsi-miskonsepsi di antara mereka sendiri merupakan unsur kunci dari konsep Piaget dan Vigotsky tentang perubahan kognitif (Pontecorvo, 1993).

Di samping itu, pendidikan Pancasila dan pendidikan agama serta pendidikan ilmu pengetahuan sosial dan sejarah secara potensial dapat dijadikan wahana pendidikan nilai. Namun demikian, potensi itu tidak teraktualisasikan jika pelajaran tersebut disajikan sebagai hafalan belaka. Oleh karena itu, penerapan pilar *learning to live together* bagi pelaksanaan dari pelajaran-pelajaran tersebut sangatlah penting. Ini berarti pendekatan pembelajaran seperti sosio drama, penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai aturan tingkah laku hubungan antar manusia dan pengajaran ilmu sosial melalui pendekatan antropologis-iluminatif, bukan kuantitatif semata dapat memungkinkan tercapainya tujuan pendidikan nasional yang terkait dengan nilai-nilai luhur, nilai Pancasila dan keagamaan.

Integrasi nilai-nilai yang dikembangkan dalam diri peserta didik ke dalam proses pembelajaran dalam bentuk atau aturan tingkah laku hubungan antar manusia, antar peserta didik, dan peserta didik dengan pendidik sangatlah perlu. Dalam istilah Israel Scheffler, perlu dikembangkan proses pembelajaran yang secara sosial dan moral relevan (Soedijarto, 1998:130). Ini artinya agar nilai-nilai yang kita idealkan dalam kehidupan masyarakat Pancasila dapat menjadi bagian dari sistem kepribadian peserta didik.

2.2 Revitalisasi Pendidikan Moral

Banyak orang berpendapat bahwa pendidikan moral hanya dapat dilaksanakan melalui pendidikan agama. Jadi, untuk memperbaiki moral generasi muda, pelajaran agama di sekolah harus ditingkatkan. Pendapat ini tidak benar dan karena itu perlu diluruskan. Pendidikan moral bukan hanya tanggungjawab guru agama, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh pengajar, seluruh pendidik di setiap sekolah. Jadi, guru Matematika, guru bahasa, guru olah raga dan sebagainya mempunyai tanggung jawab untuk turut membentuk moral peserta didik. Jika pendidikan moral hanya dilaksanakan oleh guru agama dikhawatirkan bahwa mora-

litas yang akan tumbuh dari diri generasi muda tidak lebih daripada hafalan doktrin-doktrin agama (Soedijarto, 2003). Dan pengetahuan tentang doktrin agama tidak menjamin munculnya moralitas yang dapat diandalkan.

Dalam hubungan ini perlu ditekankan, bahwa pendidikan moral pada dasarnya adalah pekerjaan membimbing generasi muda untuk secara sukarela mengikatkan diri mereka kepada norma-norma atau nilai-nilai. Philip H. Phenix (1964) dari Columbia University mengatakan bahwa pendidikan moral pada hekekatnya adalah *"to guide the young towards voluntary personal commitment to values"*. Yang penting di sini ialah bahwa *"commitment to values"* atau pengikatan diri kepada nilai-nilai harus terjadi secara sukarela, harus tumbuh dari dalam, dan bukan karena ancaman atau ketakutan kepada sesuatu di luar hati.

Sampai sekarang ini belum tampak bahwa pendidikan agama secara langsung berusaha melakukan hal itu, yaitu membuat anak mengikatkan dirinya secara sukarela kepada nilai-nilai. Pendidikan agama lebih menempatkan doktrin-doktrin tentang kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan yang bila tidak ditaati akan mendapatkan hukuman

dari Yang Maha Kuasa. Ini merupakan suatu kegiatan yang tidak akan menjamin pertumbuhan kemampuan untuk secara sekarela mengikutkan nilai-nilai kepatuhan kepada nilai-nilai terjadi karena anak takut masuk neraka, sedangkan beribadah dilakukan karena ingin masuk surga. Jadi, perilaku jelek di jauhi bukan karena kesadaran akan nilai, tetapi ketakutan akan hukuman dan perilaku yang baik dilakukan bukan karena kesadaran akan kebaikan suatu tindakan, melainkan karena keserakahan akan surga.

Dapatkah matapelajaran di luar pendidikan agama dilakukan sebagai medium menanamkan nilai-nilai? Menurut pendapat penulis, dapat! Setiap mata pelajaran tidak hanya mengandung substansi yang bersifat kognitif, tetapi dibalik hal-hal yang bersifat kognitif tadi terdapat sejumlah nilai dasar yang harus diketahui oleh peserta didik. Fisika mengajarkan kecermatan dan kejujuran dalam pengamatan. Anak yang ceroboh dalam pengamatan dan tidak jujur dalam melaporkan pengamatannya, tidak akan dapat memahami Fisika dengan baik. Ini merupakan suatu nilai.

Matematika juga mengandung suatu nilai. Dalam Matematika terdapat nilai konsistensi dalam

berpikir logis, pemahaman terhadap aksioma kemudian mencari penyelesaian melalui pengenalan terhadap semua kemungkinan-kemungkinan yang ada (*probabilities*) lalu mengeliminasi sejumlah kemungkinan tertentu dan akhirnya menemukan suatu kemungkinan yang pasti akan membawa kepada jawaban yang benar. Dengan demikian, ada pengenalan *probabilities* ada eliminasi *probabilities* ada konklusi yang menunjukkan jalan yang pasti akan menuju kepada suatu jawaban yang benar. Ini juga merupakan nilai.

Begitu pula halnya dengan matapelajaran yang lain. Pelajaran olahraga misalnya mengandung nilai bertahan sampai batas-batas kekuatan terakhir. Bekerja sama dalam suatu kelompok atau suatu tim dan bersifat kesatria terhadap lawannya. Dalam olah raga lawan bukan musuh. Ini juga merupakan suatu nilai, yang tidak seluruhnya dipahami sebagai bangsa. Orang yang berlawanan pendapat dengan kita selalu kita pandang sebagai musuh. Dalam hal ini perlu rasanya kembali kita ingat apa yang dikatakan Presiden Clinton ketika ia berkampanye untuk menjadi presiden melawan Senator Dole: "*Senator Dole is my opponent. He is not my enemy*". Nilai yang terdapat dalam pelajaran olah raga seperti ini

harus ditekankan. Sungguh sayang bahwa pelajaran olah raga acapkali hanya menekankan keterampilan fisik, tetapi tidak cukup mengungkapkan nilai-nilai yang terdapat di balik kepiawaian fisik.

Pada setiap matapelajaran mengandung nilai-nilai yang dapat diungkapkan untuk menanamkan benih-benih moralitas pada diri peserta didik. Persoalannya sekarang sudahkah kita berusaha untuk mengungkapkan nilai-nilai yang terpendam dibalik substansi berbagai matapelajaran itu? Revitalisasi pendidikan moral pada dasarnya ialah kegiatan untuk mengungkap semua nilai yang terdapat dibalik setiap mata pelajaran dari matematika sampai sejarah, dari olah raga sampai kesenian. Inilah yang harus terjadi dan hanya melalui cara inilah kita akan dapat merevitalisasi pendidikan moral di sekolah-sekolah untuk membuat generasi yang lebih bermoral daripada apa yang ada pada diri bangsa kita pada saat ini?

Ketidakmampuan pendidikan agama untuk secara sendirian mendidik moral bangsa, terlihat dari kenyataan bahwa tidak pernah ada integrasi antara pendidikan agama dan pendidikan lain guna membentuk moral peserta-didik. Tidak ada interaksi yang bersifat integrative

antara pendidikan agama dengan misalnya pendidikan kewarganegaraan (*civic education*). Apakah *civic education* tidak mengandung unsur-unsur moralitas? Ini rasanya tidak perlu diperdebatkan. Jelas, bagi orang yang mau berpikir realistik, pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan kewargaan sarat dengan nilai-nilai yang dapat dijadikan unsur untuk membina moralitas peserta didik.

2.2.1 Tantangan Zaman

Salah satu bentuk tantangan hidup yang dihadapi manusia ialah tantangan zaman, yaitu tantangan yang lahir dari persoalan-persoalan yang dihadapi suatu masyarakat atau suatu bangsa dalam suatu kurun waktu tertentu. Jika melihat ke depan, apakah tantangan zaman yang dihadapi oleh generasi muda Indonesia yang sekarang ini masih duduk di bangku sekolah? Apakah persoalan yang mereka hadapi di masa depan nanti sama dengan persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini? Menurut prediksi penulis tidak akan sama.

Secara umum dapat dikatakan bahwa setiap generasi menghadapi tantangan zamannya sendiri. Generasi yang ada sekarang ini menghadapi tantangan zaman yang

berbeda daripada generasi-generasi sebelumnya, dan generasi yang akan datang akan menghadapi tantangan zaman yang berbeda daripada tantangan zaman yang dihadapi generasi sekarang.

Melihat ke masa depan dapat dikatakan, bahwa pada dasarnya di masa datang ini akan ada dua tantangan zaman yang harus dihadapi oleh generasi muda Indonesia (Buchori, 2004). **Pertama**, tantangan untuk memulihkan kehidupan bangsa ini dari kekacauan yang ada sekarang ini. **Kedua**, tantangan menghadapi persoalan-persoalan yang lahir dari situasi global yang berkembang pada saat ini dan di masa yang akan datang.

Apakah generasi muda sekarang sudah menyadari betul tantangan zaman yang mereka hadapi pada saat ini? Ada lapisan generasi muda yang menyadari persoalan/tantangan zaman seka-rang ini, tetapi banyak pula lapisan generasi muda yang tidak menyadari apa sebenarnya tantangan zaman yang sedang dihadapi saat ini oleh bangsa Indonesia. Keluar dari krisis ekonomi, krisis politik, krisis kebudayaan merupakan tantangan terbesar pada saat ini dan tidak akan dapat memberikan jawaban secara tepat jika tidak mengetahui asal-usul berbagai krisis yang kita hadapi sekarang ini.

Sege nap kekalutan yang dialami bangsa Indonesia saat ini merupakan akibat komulatif dari kesalahan-kesalahan dalam mengambil keputusan politik oleh generasi-generasi yang telah lalu. Karena kesalahan-kesalahan tadi tidak segera terkoreksi, sehingga pada gilirannya menumpuk menjadi rangkaian persoalan yang tidak terselesaikan dan menimbulkan krisis yang berkepanjangan.

Kesalahan-kesalahan pengambilan keputusan politik terjadi oleh karena kekuatan politik yang ada di negara ini untuk suatu periode tertentu di masa lampau dan masa sekarang telah melupakan apa sebenarnya persoalan pokok yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Kekuatan-kekuatan politik sibuk memperebutkan kekuasaan dan lupa mempersoalkan pengabdian yang harus diberikan kepada bangsa. Oleh karena itu lahirlah persaingan politik yang tidak berorientasi kepada kepentingan rakyat banyak, tetapi kepada kepentingan golongan dan bahkan kepada kepentingan diri sendiri.

Persoalannya sekarang ialah bagaimana menghidupkan kembali budaya politik yang sehat, yaitu yang lebih mendahulukan kepentingan rakyat daripada kepentingan ke-

lompok sendiri. Dalam definisi yang sublim yang halus, politik adalah suatu seni mengelola lingkungan manusia dan non-manusia dengan cara-cara yang sebanyak mungkin menguntungkan rakyat banyak. Tapi dalam artinya yang kasar, yang vulgar, politik adalah seni memperebutkan kekuasaan mengatur masyarakat. Berdasarkan analisis ini sekarang dapat dikatakan, dalam jangka pendek tantangan yang dihadapi sebagai bangsa ialah bagaimana memperbaiki kehidupan politik. Termasuk dalam hal ini ialah pembaharuan kehidupan politik.

Dalam jangka panjang, tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia ialah bagaimana menempatkan diri sebagai bangsa dalam arus globalisasi yang sekarang ini sedang terjadi di seluruh dunia. Globalisasi pada dasarnya adalah kekuatan ekonomi global yang bersifat raksasa dan yang telah menimbulkan saling ketergantungan atau interdependensi yang besar antara bangsa-bangsa dan negara-negara di seluruh dunia. Globalisasi telah melahirkan pasar global (*global market*) dan juga dalam arti tertentu melahirkan budaya global (*global culture*). Kebiasaan minum coca-cola misalnya, telah menjadi suatu hal yang dilakukan di mana-mana di

dunia ini. Globalisasi ditandai oleh lokalisasi kecenderungan global dan globalisasi peristiwa-peristiwa lokal.

Globalisasi dapat menguntungkan, tetapi dapat pula merugikan. Suatu bangsa yang tidak cukup pandai melakukan peranannya di dalam globalisasi akan lebih banyak mengalami kerugian daripada mendapatkan keuntungan. Sekarang ini Indonesia dapat dikatakan menjadi salah satu dari pecundang, salah satu dari *losers*, dalam permainan global. Yang mendapatkan manfaat yang paling besar ialah negara-negara dengan ekonomi yang kuat, ekonomi yang kaya, dan sistem politik yang cukup baik. Negara-negara miskin dengan sistem politik yang rapuh sukar untuk mendapatkan manfaat dari globalisasi.

Berdasarkan kecenderungan ini maka terjadilah aliansi-aliansi antara negara-negara yang kecil untuk menyusun bersama dan untuk memperebutkan tempat yang menguntungkan serta terhormat di dalam seluruh permainan global. Persoalan yang dihadapi bangsa ini sekarang ialah bagaimana memperbaiki posisi dalam dunia yang telah hanyut di dalam globalisasi. Hal ini berarti generasi muda yang akan datang harus lebih menguasai kesempatan serta persoalan yang terdapat di dalam

ekonomi global dan harus mempunyai tekad untuk melakukan kegiatan ekonomi yang tidak saja menguntungkan dirinya sendiri, tetapi juga dapat mengangkat posisi bangsa dalam percaturan dunia yang telah menjadi terglobalisasi. Kalau ini tidak terjadi, maka yang dikatakan Bung Karno akan menjadi kenyataan, yaitu bahwa kita akan menjadi suatu bangsa yang terdiri dari kuli-kuli dan menjadi kuli dalam kehidupan antar bangsa.

Dalam jangka panjang tantangan zaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ialah bagaimana memahami tempat bangsa ini di dalam kehidupan antar bangsa yang akan datang. Kalau hal ini benar-benar dipahami, maka akan muncul kekuatan-kekuatan baru di kalangan generasi muda, yang akan mampu menjawab tantangan yang lahir dalam situasi-situasi yang akan datang.

2.2.2 Tantangan Moralitas Bangsa

Dalam konteks makalah ini moralitas bangsa ialah kepatuhan bangsa kepada nilai-nilai yang mendasari perilaku untuk menjawab tantangan zaman. Jadi, yang harus ditentukan ialah nilai-nilai apa saja yang harus disusun untuk melahirkan perilaku bangsa yang akan mengangkat

bangsa dari krisis yang ada sekarang ini serta kemudian membuat bangsa mampu mengangkat derajat dirinya dalam pergaulan dengan bangsa-bangsa lain. Ini merupakan pekerjaan yang cukup sukar dan cukup kompleks. Pekerjaan semacam ini tidak dapat dilakukan oleh seseorang atau kelompok kecil orang, tapi harus ditentukan secara kolektif oleh mereka yang merasa dirinya menjadi pemimpin dari bangsa ini. Perilaku bangsa pada akhirnya ditentukan oleh perilaku dari orang-orang yang dipandang bangsa itu sebagai pemimpin-pemimpinnya. Tanpa kepemimpinan yang jelas, tanpa ada pemimpin-pemimpin yang memperlihatkan contoh-contoh yang nyata mengenai perilaku untuk keluar dari krisis dan perilaku untuk mengangkat derajat diri dalam pergaulan dengan bangsa-bangsa lain tidak mungkin dapat menjawab kedua jenis tantangan zaman dengan baik.

Masalahnya sekarang adalah bagaimana dalam pendidikan moral •kita melatih peserta-didik untuk bersama-sama menjawab pertanyaan di atas tadi, menentukan nilai-nilai apa yang akan membuat kita mampu mengatasi krisis sekarang ini dan nilai-nilai apa pula yang akan membuat kita mampu meningkatkan derajat kita di mata bangsa-bangsa

lain. Dalam hubungan ini perlu dibicarakan, mengapa selalu ada kesenjangan antara susunan nilai yang bersifat tekstual dengan susunan nilai yang bersifat actual. Selalu ada kesenjangan tentang apa yang kita ketahui tentang nilai-nilai dan apa sebenarnya yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari dari nilai-nilai yang kita ketahui tadi. Dalam zaman apa pun dan dalam masyarakat manapun kesenjangan ini selalu ada. Persoalannya bagaimana membuat kesenjangan ini sekecil mungkin dan tidak membiarkan terjadinya kesenjangan yang makin lama makin lebar. Membiarkan melebarnya kesenjangan antara sistem nilai tekstual dengan sistem nilai actual berarti membiarkan tumbuhnya kemunafikan dalam diri bangsa.

Tidak semua nilai yang kita ketahui selalu berhasil kita amalkan. Antara pengetahuan atau *cognitio* dengan pengamalan atau *praxis* terdapat suatu jarak yang dapat panjang tetapi dapat pula pendek. Antara kognisi dan praksis terdapat empat langkah yang harus dilalui setiap orang. Antara mengetahui suatu nilai dengan mengamalkan suatu nilai terdapat empat langkah batin yang harus dilakukan setiap orang. Secara keseluruhan langkah-

langkah itu ialah: (1) kognisi (*cognitio*), (2) efeksi (*afectio*), (3) volisi (*volitio*), (4) konasi (*conatio*), (5) motivasi (*motivatio*), dan (6) *praxis* yaitu pengamalan.

Dalam hal-hal yang bersifat sederhana proses batin yang terjadi antara kognisi sampai ke *praxis* sangat cepat. Sehingga kita merasa, bahwa yang kita ketahui segera dapat kita amalkan. Tetapi dalam hal-hal tertentu lainnya, proses ini dapat menjadi sangat lambat, sangat alot, sehingga seseorang tidak akan pernah sampai pada *praxis*, tidak sampai pada suatu pengamalan nilai. Contoh yang sederhana dan sering kali dikutip ialah bahwa setiap orang yang mempunyai surat ijin mengemudi kendaraan bermotor dianggap tahu semua peraturan-peraturan tentang lalu lintas. Tetapi dalam kenyataan hidup sehari-hari, kebanyakan dari mereka yang mempunyai surat ijin mengemudi kendaraan bermotor tadi melanggar banyak peraturan yang seharusnya mereka ketahui.

Suatu pengetahuan yang tidak melahirkan pengamalan bisa berhenti pada titik *cognitio* saja, dan tidak melahirkan apa-apa. Tapi bisa saja berhenti di titik *afectio* dan kita merasa apa yang kita ketahui, tapi selanjutnya tidak terjadi apa-apa. Contoh, terjadinya kegagalan-

kegagalan dalam perilaku peradvokasian, perilaku para *lawyers*, para sarjana hukum yang oleh masyarakat dianggap mengetahui nilai-nilai untuk menegakkan keadilan, tetapi dalam kehidupan nyata dipandang oleh masyarakat meningkari atau menginjak-injak nilai-nilai keadilan. Ini contoh dari suatu kemunafikan yang sungguh menodai nama bangsa.

Secara umum dapat dikatakan bahwa yang paling sukar ialah menembus titik *volitio* dan *conatio*. *Volitio* ialah *krenteg* (dalam Bahasa Jawa) yaitu bertindak sesuai dengan keinginan untuk berbuat sesuatu, sedangkan *conatio* ialah tekad untuk benar-benar berbuat apa yang diinginkan. Ada orang yang sekedar ingin menjadi pemain musik handal, misalnya, tapi tidak pernah berbuat sesuatu yang nyata untuk mewujudkan keinginannya menjadi kenyataan. Tidak ada kemampuan untuk membulatkan tekad menjadi kenyataan. Tidak ada kemampuan untuk membulatkan tekad melakukan sesuatu yang nyata dalam mewujudkan cita-cita. Di sinilah letak perbedaan antara impian dan cita-cita. Impian adalah ide-ide, gagasan-gagasan tentang sesuatu tetapi tidak pernah dinyatakan dalam tindakan, sedangkan cita-cita adalah gagasan

yang diterjemahkan ke dalam tindakan nyata.

Perbedaan antara pemimpi dan perencana ialah, bahwa pemimpi tidak pernah menterjemahkan keinginannya menjadi rancangan-rancangan tindakan nyata, sedangkan seorang perencana adalah orang yang mampu merinci impian-impian menjadi langkah-langkah yang akan dilaksanakannya. Dalam hubungan ini dapat dikatakan bahwa kelemahan kita dalam mendidik moralitas ialah, bahwa kita tidak pernah menyentuh hati peserta didik untuk menembus tembok-tembok *volitio* dan *conatio*. Jarang sekali merangsang peserta didik untuk menginginkan sesuatu yang besar dan membulatkan tekad mewujudkan keinginannya tadi menjadi tindakan-tindakan yang nyata. Dalam hubungan ini dapat dikatakan bahwa dalam pedagogik klasik selalu dikatakan, bahwa pengajaran yang baik atau tindakan mengajar yang baik ialah tindakan mengajar yang dapat mengilhami peserta didik untuk berbuat sesuatu yang besar. Pengajaran yang baik ialah pengajaran yang memberikan inspirasi. Pendidikan moral tidak dapat dilakukan melalui ceramah-ceramah atau khotbah-khotbah belaka. Khotbah hanya akan melahirkan pengetahuan, tetapi jarang melahirkan pengamalan.

Analisis yang lain mengatakan bahwa suatu nilai akan menjadi tindakan atau pengamalan kalau seseorang mengetahui nilai itu, lalu memahami nilai tadi, kemudian menerima nilai tadi, dan selanjutnya membulatkan tekad untuk mengamalkan nilai tadi. Langkah-langkah ini tadi disebut *knowing*, *comprehending*, *accepting*, *internalizing*, dan *implementing*.

Dalam soal pendidikan nilai-nilai kearifan yang sekarang ini telah merupakan suatu konsensus di antara para ahli ialah bahwa nilai-nilai hanya dapat diajarkan secara efektif melalui contoh-contoh dan dalam lingkungan yang sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan. Karena pendidikan moral adalah sintesa dari berbagai jenis pendidikan nilai, maka pendidikan moral yang efektif juga hanya akan terjadi melalui lingkungan yang kondusif yang sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan, dan melalui contoh-contoh bagaimana nilai-nilai tadi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang sederhana bahwa sifat rajin bekerja tidak dapat ditanamkan oleh seseorang yang malas dan tidak dapat ditanamkan dalam lingkungan yang penuh dengan kemalasan. Kejujuran tidak dapat ditanamkan oleh manusia yang korup dan tidak juga dapat

ditumbuhkan atau dipupuk dalam lingkungan yang penuh dengan tindakan *corruptive*.

Prinsip ini kelihatannya sederhana, tetapi kalau hal ini dihubungkan dengan agenda revitalisasi pendidikan moral, akan segera terlihat kepada betapa besarnya hambatan-hambatan yang harus diatasi oleh setiap pendidik atau setiap kelompok pendidik yang mau menanamkan moral untuk membina kemampuan generasi muda menjawab tantangan zaman.

Semua orang sudah tahu bahwa untuk keluar dari krisis sekarang ini praktik-praktik KKN harus dibersihkan, harus dihentikan. Tetapi soalnya bagaimana menanamkan nilai-nilai tentang kejujuran, kemandirian dan demokrasi, yaitu nilai-nilai yang dapat membendung KKN dalam suasana yang masih penuh dengan praktik-praktik KKN. Oleh karena itu betapa pentingnya aspek pembinaan konatif untuk pendidikan moral yang akan melahirkan moralitas yang akan membuat bangsa mampu menjawab tantangan zaman dengan baik. Ini berarti bahwa harus mendorong peserta didik atau generasi muda untuk berani melawan arus, untuk berani menghentikan kebohongan, untuk berani menghentikan kemunafikan. Artinya, kita yang akan

menjadi pendidik dan yang menjadi pendidik juga harus berani melawan segenap kebohongan dan kemunafikan. Ini hanya bisa dilakukan jika kita merupakan suatu front moralitas baru, suatu barisan pendidik yang bertekad untuk memperbarui moral bangsa dan untuk menghentikannya segenap kebohongan, segenap kemunafikan dan segenap ketidakadilan yang masih ada dalam masyarakat sekarang ini.

3. Simpulan dan Saran

3.1 Simpulan

Praktik-praktik yang ada sampai sekarang ini dalam pendidikan moral tidak mungkin diharapkan akan melahirkan moralitas bangsa yang baru; moralitas bangsa yang mampu memotong semua rantai kebohongan, korupsi, dan kesewenang-wenangan yang selama ini melilit bangsa. Harus ditemukan cara-cara yang baru yang dapat membuat generasi muda mengetahui apa nilai-nilai yang harus mereka taati, kemudian memahami nilai-nilai, dan akhirnya mengamalkan nilai-nilai tadi. Moralitas hanya dapat dibangun melalui pemahaman akan makna moralitas bangsa yang baru dan kebulatan tekad untuk menjadi bagian dari usaha bangsa memotong belenggu yang telah melumpuhkan sendi-sendi negara-bangsa Indonesia.

3.2 Saran

Perlu diciptakan iklim sekolah yang bebas dari praktik-praktik korupsi melalui manajemen pengelolaan yang mengedepankan transparansi, demokratis, dan akuntabel.

Diharapkan saat ini pembelajaran di sekolah mementingkan penanaman nilai-nilai moral melalui semua mata pelajaran kepada peserta

didik. Praktik pembelajaran saat ini lebih mengembangkan kognitif tingkat rendah dan lupa menanamkan nilai-nilai dibalik mata pelajaran. Padahal pendidikan moral pada dasarnya ialah kegiatan untuk mengungkap semua nilai yang terdapat dibalik setiap mata pelajaran dari matematika sampai sejarah, dari olah raga sampai kesenian.

Pustaka Acuan

- Buchori, Muchtar. 2004. *Revitalisasi Pendidikan Moral dalam Menghadapi Tantangan Zaman*. Makalah, disampaikan kepada para peserta Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis ke 47 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, di selenggarakan di Yogyakarta tanggal 19 September 2002.
- Darmaningtyas. 2005. *Pendidikan Rusak-Rusakan*. Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta.
- Delors, Jacques. 1996. *Learning: The Treasure Within*. Paris: Report UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty-first Century, UNESCO Publishing.
- Kompas, 03 Mei 2005. Memberantas Korupsi, Mulailah dari Sekolah: <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0505/05/PendDN/1723751.htm>
- Muslimin, Ibrahim, Fidha Rachmadiyanti, dan Ismono. 2000. *Pembelajaran Kooperatif*. Surabaya: Pusat Sains dan Matematika Sekolah, Program Pascasarjana UNESA, University Press.
- Philip H. Phenix. 1964. *Realms of Meaning: A Philosophy of The Curriculum for General Education*. New York: McGraw Hill Book, Co.
- Pontecorvo, C. 1993. *Social interaction in the acquisition of knowledge*. *Educational Psychology Review*, 5(3) 293-310.
- Soedijarto. 1998. *Pendidikan sebagai Sarana Reformasi Mental dalam Upaya Pembangunan Bangsa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Soedijarto. 2000. *Pendidikan Nasional sebagai Wahana Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dan Membangun Peradaban Negara Bangsa*. Jakarta: Certer for Information and National Policy Studies (CINAPS).
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.